



► PILKADA KOTA JOGJA

Bawaslu Mulai Antisipasi Kerawanan

KOTAGEDE—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja mulai bersiap mengawal gelaran Pilkada 2024. Wakil Koordinator SDM, Organisasi, Diklat, dan Data Informasi Bawaslu Kota Jogja, Siti Nurhayati, mengatakan saat ini Bawaslu menunggu regulasi Pilkada 2024. Pasalnya, akan ada regulasi yang kemungkinan di-update lantaran ini merupakan gelaran pilkada serentak pertama kalinya di Indonesia. Regulasi pilkada serentak saat ini masih disusun di tingkat pusat.

"Dalam hal regulasi pasti akan banyak update sehingga Bawaslu perlu untuk mereviu regulasi pilkada yang masih saat ini dalam tahap penyusunan regulasi di Pusat, baik itu dari KPU maupun Bawaslu," ujar Nurhayati saat dihubungi, Minggu (5/5).

Nurhayati menyebut dalam proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota Jogja dimungkinkan terjadi kerawanan konflik dan gesekan. Pencalonan terbagi menjadi tiga jalur, yakni pencalonan lewat kader partai, pencalonan lewat dukungan partai, dan pencalonan perseorangan.

Perbedaan pilihan ormas dan kelompok masyarakat pendukung calon wali kota dan calon wakil wali kota tertentu berpotensi menimbulkan kerawanan konflik dan gesekan. "Ada perbedaan pilihan dari setiap ormas yang ada. Kami melihat di proses pilkada, gesekannya akan lebih terlihat," katanya.

Jika berkaca pada Pemilu 2024, Nurhayati mengatakan tahap kampanye juga berpotensi menimbulkan kerawanan. Bawaslu Kota Jogja mencatat adanya sejumlah pelanggaran kampanye yang terjadi pada Pemilu 2024. "Baik itu dalam pemasangan alat peraga kampanye maupun dari sisi ketaatan terhadap regulasi kampanye yang tidak boleh, misalkan di sarana pendidikan, ibadah. Kan ada beberapa yang nyerep-nyerep begitu. Kalau berkaitan dengan kampanye pasti akan diwarnai dengan hal-hal seperti itu," katanya.

Bawaslu akan mengantisipasi sejumlah kerawanan yang terjadi pada gelaran pilkada. Misalnya berkomunikasi intensif dengan berbagai *stakeholder* untuk memastikan pilkada berjalan sesuai dengan regulasi.

Selain itu, badan *ad hoc* diberi pelatihan secara maksimal untuk mengindari potensi pemungutan suara ulang. "Dalam pilkada ada kerawanan terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri. Itu juga harus diantisipasi," katanya. *(AM Amissa Karini)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005